

DAFTAR PUSTAKA

- Andriany, D., & Qibthiyyah, R. M. (2018). Analisis Hubungan antara Infrastruktur Jalan dan Tax Capacity: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 33–50.
- Aribowo, I., & Rinaningsih. (2013). *Modul Metode Penggalan Potensi*. Pusdiklat Pajak.
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2022). *Konstruksi dalam Angka Provinsi Jawa Barat 2022* (Failillah, Ed.). BPS Provinsi Jawa Barat.
- Brigida. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Pengawasan Kewajiban Perpajakan atas Usaha Jasa Konstruksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2020. Dalam *PKN STAN*. PKN STAN.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design* (H. Salmon, J. Scappini, C. Pearson, L. Larson, & M. Markanich, Ed.; Fourth Edition). SAGE Publications, Inc.
- Danuri, & Maisaroh, S. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan* (A. C., Ed.). Penerbit Samudra Biru.
- EWK, A. K. (2022). 9 Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2022, Sudah Sejauh Mana?
- Hapsari, I. (2021). Penghindaran Pajak Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 397–406.
- Harjanti, R. S., & Hetika, H. (2020). Evaluasi Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Pada PT. X. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 130–136.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Buku II Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*.
- Lim, S. A. (2022). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlakuan Pajak Penghasilan Untuk Bisnis Konstruksi Kualifikasi Usaha Kecil. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(1), 11–22.
- Manuputty, J. L. E., & Sudradjat, S. (2018). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(3), 205–216.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.

- Nurdiana, D., & Fadilah, M. R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Marina Cipta Pratama Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 3(1), 24–40.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Pemerintah Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Priyawibawa, I. (2022). *Panduan Praktis Penggalan Potensi KLU 42919*.
- Pusat Statistika, B. (2023). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2022*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Rani, H. A. (2016). *Manajemen Proyek Konstruksi* (1 ed.). Penerbit Deepublish.
- Rini, P., & Yulianto, K. I. (2020). Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus pada PT. Vpower Operation Services). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 1(2), 64–70.
- Setiawan, D. A. (2014). Proses Bisnis dan Aspek Perpajakan Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi (Content Analysis dan Hermeneutic Analysis). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 199–222.

- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283.
- Tim Kementerian Keuangan. (2022). *Informasi APBN 2022 Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural* (DJA & Dit. PAPBN, Ed.).
- Tooma, R. A. (2008). *Legislating against tax avoidance*. IBFD.
- Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid–19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 217–234.
- Yarnita, Y. (2013). *Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada PT. Stabilished Pavement Indo* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/5399>